



# Journal of Social and Economics Research

## Volume 7, Issue 2, December 2025

P-ISSN: 2715-6117

E-ISSN: 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

### ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBUKOTA

### POLICY ANALYSIS OF PANCASILA IDEOLOGY STRENGTHENING IN THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA POST-CAPITAL RELOCATION LAW

Rahmat Salam<sup>1</sup>, Izzatusolekha<sup>2</sup>, Muhammad Zuhriyanto<sup>3</sup>, Zulkifli Daud<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: [rahmat.salam@umj.ac.id](mailto:rahmat.salam@umj.ac.id)

#### INFO ARTIKEL

##### Kata Kunci:

Kebijakan, Ideologi Pancasila, Implementasi, Strategi, Daerah Khusus Jakarta, UU IKN.

#### ABSTRAK

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang krusial, terutama di era globalisasi dengan berbagai tantangan seperti pengaruh budaya asing, individualisme, dan liberalisme. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca diterbitkannya Undang-undang Pemindahan Ibu Kota (UU IKN). Penelitian kualitatif ini mengadopsi pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait di DKJ, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan ideologi Pancasila di DKJ telah dilakukan secara serius dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, dimotori Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasca perubahan status Jakarta. Namun, ditemukan pula bahwa tugas penguatan ini belum sepenuhnya selesai, mengingat masih diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila yang komprehensif serta kolaborasi yang lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seperti pendidikan karakter dan sosialisasi nilai-nilai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta variasi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila. Untuk mengoptimalkan penguatan ideologi Pancasila di DKJ, penelitian ini merekomendasikan strategi prioritas yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan Pancasila di semua jenjang, penguatan peran keluarga, optimalisasi peran media massa, pendorong peran aktif organisasi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

---

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Policy, Pancasila Ideology, Implementation, Strategy, Special Capital Region of Jakarta, UU IKN.</p>	<p><i>The Pancasila ideology serves as Indonesia's fundamental state philosophy and way of life, becoming increasingly crucial in the era of globalization to counter challenges such as foreign cultural influences, individualism, and liberalism. This research focuses on analyzing policies for strengthening the Pancasila ideology in the Special Capital Region of Jakarta (DKJ) following the enactment of the Law on the Relocation of the Capital City (UU IKN). This qualitative research adopts a case study approach. Primary data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders in DKJ, while secondary data were obtained from literature reviews and policy documents. Data were analyzed using a thematic analysis method. The research findings indicate that efforts to strengthen the Pancasila ideology in DKJ have been seriously and continuously undertaken by various parties, spearheaded by the Provincial Government of DKI Jakarta, following Jakarta's change in status. However, it was also found that this task of strengthening is not yet complete, as the comprehensive application of Pancasila values and more optimal collaboration across all levels of society are still required. Various policies have been issued, including character education and the socialization of values, but their implementation still faces challenges such as budget limitations, sub-optimal inter-agency coordination, and varying levels of public awareness regarding the importance of Pancasila. To optimize the strengthening of the Pancasila ideology in DKJ, this research recommends priority strategies that include improving the quality of Pancasila education at all levels, strengthening the role of families, optimizing the role of mass media, encouraging active participation from community organizations, and increasing public involvement in activities promoting Pancasila values.</i></p> <hr/> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i></p>

## PENDAHULUAN

Penguatan ideologi Pancasila menjadi semakin penting di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia. Dinamika pasca diterbitkannya Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota (UU IKN) menjadikan Jakarta menghadapi tantangan baru yang berpotensi memengaruhi internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Salah satu tantangan utamanya adalah masuknya pengaruh budaya asing dan ideologi transnasional yang dapat mengikis nilai-nilai luhur Pancasila, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar arus informasi digital tanpa filter. Selain itu, Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi, bisnis, dan politik pasca-IKN, memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penguatan Pancasila di Jakarta menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap dinamika perubahan tidak melemahkan benteng ideologi bangsa.

Fenomena ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:



**Gambar 1. Benteng Ideologi Pancasila di Jakarta Kota Global**

Sumber: Tim Peneliti (Diolah 2024-2025)

Gambar ini menggambarkan bahwa pasca penerbitan UU IKN, Jakarta bertransformasi menjadi kota global yang tetap menjadi pusat bisnis dan ekonomi, serta hingga penelitian ini selesai, masih berperan sebagai pusat politik. Dinamika yang sangat dinamis ini menuntut masyarakat Jakarta untuk senantiasa menjadikan ideologi Pancasila sebagai benteng kehidupan berbangsa dan bernegara. Benteng ideologi ini diharapkan mampu menangkis berbagai serangan dari pengaruh negatif media sosial, ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, serta pengaruh budaya asing. Lebih lanjut, tekanan ekonomi dan persaingan hidup yang ketat, serta potensi pengaruh politik praktis non-Pancasialis, juga perlu diwaspadai agar tidak menggerus penghayatan Pancasila.

Penguatan Pancasila secara fundamental sangat bergantung pada kebijakan publik yang dipilih dan dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta. Analisis kebijakan publik terhadap upaya penguatan Pancasila ini menjadi latar belakang utama penelitian, dengan harapan dapat merumuskan solusi konkret untuk menjaga implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana ditegaskan oleh Salam et al. (2024) dalam buku *Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila*, Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan publik. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan filosofis bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia. Aspek-aspek hubungan tersebut meliputi:

1. Pancasila sebagai sumber nilai dan norma: Kebijakan publik harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Pancasila sebagai pedoman moral: Pembuat dan pelaksana kebijakan harus memiliki integritas moral tinggi dan berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

3. Pancasila sebagai pemersatu bangsa: Kebijakan publik harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari diskriminasi, dan mengutamakan kepentingan bersama.
4. Pancasila sebagai sumber inspirasi: Pancasila menginspirasi kebijakan yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi rakyat.

Secara regulasi, penguatan Pancasila telah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk:

1. Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
2. Panduan Pengembangan Projek Profil Pelajar Pancasila (P5) Edisi Revisi Tahun 2024, yang memberikan pedoman pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter Profil Pelajar Pancasila, dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan projek Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Daerah Khusus Jakarta, Bapak Sarjoko (wawancara, Mei 2025), menjelaskan bahwa kegiatan ini dapat berfokus pada tema-tema seperti perubahan iklim, anti-radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi.

Mengingat latar belakang fakta, regulasi, serta kewaspadaan terhadap ancaman negatif dari disinformasi media sosial, ideologi lawan Pancasila, pengaruh budaya asing, tekanan ekonomi, dan politik praktis non-Pancasialis, maka penelitian "Analisis Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta Pasca Undang-undang Pemindahan Ibukota Negara" ini menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk menemukan langkah antisipatif dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat Daerah Khusus Jakarta pasca diterbitkannya Undang-undang Pemindahan Ibukota Negara, antara lain:

1. Lemahnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Hal ini diakibatkan oleh minimnya edukasi Pancasila yang komprehensif di sekolah, gempuran budaya asing melalui media sosial, serta pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
2. Maraknya praktik politik yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Politik uang, korupsi, dan pengembangan politik identitas yang memecah persatuan, telah merusak citra demokrasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila.
3. Ancaman ideologi radikalisme dan ekstremisme. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka peluang penyebaran ideologi radikalisme dan ekstremisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Belum optimalnya peran penegakan hukum dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum yang lemah dan belum sepenuhnya berkeadilan dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pancasila dan memicu berbagai konflik sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan ideologi Pancasila di era globalisasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas implementasi kebijakan penguatan ideologi Pancasila, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, komprehensif, berdayaguna, dan berhasil guna untuk penguatan ideologi Pancasila secara khusus di Jakarta dan secara umum di wilayah Republik Indonesia secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sistem nilai dan norma yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila Pancasila–Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, menjadi panduan bagi semua warga negara.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas dinamika dan tantangan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era globalisasi. Secara umum, literatur-literatur tersebut memberikan landasan teoritis dan empiris bagi penelitian ini.

Abdurrahman (2021) menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi pengaruh globalisasi yang dapat menggeser nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Dalam penelitiannya, ia menekankan strategi yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara di tengah arus modernisasi dan keterbukaan informasi.

Sementara itu, Afifuddin (2020) menekankan peran pendidikan politik berbasis Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda. Ia berargumen bahwa Pancasila perlu diajarkan secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman serta membentengi peserta didik dari krisis identitas dan degradasi moral.

Akbar (2019) melakukan studi kebijakan di Provinsi Jawa Barat dan menemukan bahwa program-program penguatan ideologi Pancasila masih menghadapi kendala implementatif, baik dari segi kelembagaan maupun partisipasi publik. Ia merekomendasikan adanya kebijakan yang lebih partisipatif dan adaptif dalam mendekatkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

Dalam konteks teknologi, Ardianto (2018) menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya kepada generasi muda yang akrab dengan dunia digital. Strategi digitalisasi nilai kebangsaan menjadi penting dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat saat ini.

Basri (2017) menambahkan perspektif hukum dengan menekankan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga eksistensi ideologi Pancasila. Ia menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, institusi, dan penegak hukum untuk membendung praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

Selain artikel jurnal, dua karya buku oleh Salam (2021; 2022) menjadi referensi penting dalam memahami pendekatan kebijakan publik yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Dalam *Kembalilah ke Pancasila* (2021), Salam menekankan urgensi revitalisasi nilai Pancasila sebagai fondasi ideologis dalam merespons perubahan sosial dan politik, termasuk perubahan Jakarta dari pusat pemerintahan menjadi pusat ekonomi global. Buku keduanya, *Kebijakan Publik dan Pancasila* (2022), menguraikan pentingnya merumuskan kebijakan publik yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga sejalan dengan semangat dan “ruh” Pancasila, khususnya dalam reformasi birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Pancasila tidak hanya terbatas pada dimensi normatif dan filosofis, tetapi telah berkembang menjadi kajian interdisipliner yang mencakup aspek politik, hukum, teknologi, dan kebijakan publik. Penelitian ini akan memperkuat dan melanjutkan diskursus tersebut dengan mengkaji penguatan Pancasila dalam konteks kekinian.

Dari berbagai literatur yang telah dikaji, terdapat beberapa hal penting yang menjadi benang merah dalam upaya penguatan ideologi Pancasila di era globalisasi. Pertama, terdapat kebutuhan mendesak akan pendidikan Pancasila yang komprehensif dan kontekstual, terutama bagi generasi muda. Pendidikan tersebut tidak cukup hanya bersifat teoritis, tetapi harus mampu menjawab tantangan zaman serta disampaikan dengan pendekatan yang relevan dan aplikatif agar nilai-nilai Pancasila dapat tertanam secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peran keluarga, organisasi masyarakat sipil, dan media massa sangat penting dalam mendukung proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter anak sejak dini, sementara organisasi masyarakat dan media dapat menjadi agen penyebaran nilai kebangsaan secara masif, kreatif, dan berkelanjutan. Ketiga, literatur juga menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten sebagai bagian dari perlindungan terhadap ideologi negara. Penegakan hukum harus mampu menindak setiap bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila serta memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga hidup dalam tatanan hukum dan kehidupan sosial. Keempat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sarana strategis untuk menyebarluaskan edukasi dan informasi tentang Pancasila kepada masyarakat luas, khususnya generasi digital. TIK dapat digunakan sebagai media kampanye nilai-nilai kebangsaan melalui platform daring, media sosial, maupun konten edukatif berbasis digital lainnya. Dengan demikian, penguatan Pancasila membutuhkan pendekatan multi-aktor dan multi-sektor, yang mencakup aspek pendidikan, hukum, sosial, dan teknologi secara terpadu.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang difokuskan pada implementasi kebijakan penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara. Data diperoleh melalui tiga teknik utama: tinjauan pustaka, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat pemerintah, akademisi, dan aktivis, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program terkait Pancasila. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan tahapan mulai dari memahami data, memberi kode,

mengelompokkan menjadi tema, hingga menyusun laporan analisis secara sistematis. Penelitian ini mengutamakan prinsip etika dan objektivitas untuk menghasilkan data yang valid dan kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Penguatan Pancasila di Daerah Khusus Jakarta

Bagian ini akan menjadi fondasi untuk memahami upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di Jakarta pasca pemindahan ibukota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebelum Undang-undang Ibukota) telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan yang bertujuan antara lain untuk menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai program yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pembelajaran. Di sisi lain, berbagai komunitas masyarakat juga aktif menyelenggarakan kegiatan penguatan ideologi Pancasila untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila (JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta, 2005).

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), menyatakan pada akhir tahun 2024 bahwa pihaknya sedang menunggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan proses administrasi revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 menjadi Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, dengan draf revisi sudah disiapkan (wawancara, Abdul Aziz, 2024). Diskusi dengan Abdul Aziz menguatkan pemahaman tim peneliti mengenai pentingnya penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta, yang kemudian dirumuskan ke dalam visualisasi berikut:



Gambar 2. Mengapa Perlu Penguatan Ideologi Pancasila

Sumber: Tim Peneliti (diolah, 2024)

Memperkuat penjelasan bagan tersebut, deskripsi kebijakan ini mengidentifikasi bahwa pemindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat memiliki pengaruh yang kompleks pada nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Jakarta:

1. Perubahan sosial dan budaya: Pemindahan ibukota dapat menyebabkan perubahan sosial dan budaya di Jakarta seiring perpindahan instansi pemerintah dan lembaga negara. Ini mempengaruhi nilai-nilai Pancasila seperti kebersamaan dan kesatuan, menuntut adaptasi masyarakat.
2. Pengaruh ekonomi: Pergeseran lapangan kerja ke IKN dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat Jakarta. Hal ini berdampak pada nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan kesejahteraan, mendorong masyarakat untuk beradaptasi demi mempertahankan kesejahteraan.
3. Pengaruh politik: Perpindahan kegiatan politik dan pemerintahan ke IKN dapat mempengaruhi nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi dan partisipasi, menuntut adaptasi masyarakat Jakarta terhadap perubahan tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa pemindahan ibukota ke IKN juga memiliki potensi pengaruh positif pada nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Jakarta, seperti:

1. Pengembangan nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan: Pemindahan ibukota dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan di kalangan masyarakat Jakarta, karena mereka harus bekerjasama untuk menghadapi perubahan tersebut.
2. Pengembangan nilai-nilai kemandirian dan kreativitas: Pemindahan ibukota dapat memperkuat nilai-nilai kemandirian dan kreativitas di kalangan masyarakat Jakarta, karena mereka harus berupaya untuk mempertahankan kesejahteraan mereka.

### **Temuan Kunci Penguatan Ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta**

Fakta penguatan ideologi Pancasila, sebagai upaya serius berkelanjutan, yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan Ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta pasca terbitnya UU IKN telah dilaksanakan secara serius oleh segenap pihak terkait. Strategi Penguatan Ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta merupakan Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dengan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ideologi Pancasila. Upaya serius menerbitkan berbagai kebijakan ini sebagai kebijakan penting dalam penguatan ideologi Pancasila antara lain: a. Peraturan Daerah (Perda) tentang Penguatan Ideologi Pancasila. b. Program Pembinaan Ideologi Pancasila di lingkungan ASN. c. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila. d. Kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat dalam penguatan ideologi Pancasila, serta berbagai upaya serius lainnya. Fakta penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta ini, Tim Peneliti telah mewawancarai bapak Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan sebagai berikut: *“Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam memperkuat ideologi Pancasila, strategi tersebut berupa penguatan pendidikan Pancasila di lingkungan masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran Pancasila di Semua Jenjang Pendidikan. Pengembangan Budaya dan Kearifan Lokal yang Berlandaskan Pancasila. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Agen Perubahan. Pemantapan Peran Keluarga dalam Menanamkan Nilai-nilai Pancasila kepada Anak-anak. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penguatan Penegakan Hukum dan Keteladanan Pemimpin.”* (Sarjoko, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Juni 2025).



Karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa fakta penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta pasca pemindahan Ibukota telah dan sedang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya serius berkelanjutan ini didukung oleh komitmen kuat dari Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat. Tim pebelitian pun menyaksikan bahwa upaya yang dimotori oleh jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tersebut, hingga penelitian ini selesai pada Juli 2025, proses tersebut masih berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas penguatan ideologi Pancasila telah dan sedang diupayakan terus dalam berbagai kebijakan, meskipun demikian, tugas membumikan nilai-nilai Pancasila melalui penerapannya dalam kehidupan masyarakat Jakarta sehari-hari, masih merupakan pekerjaan rumah bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan masyarakat. Tugas ini sangat krusial dan menantang untuk terus dilanjutkan, mengingat urgensi bagi masyarakat untuk senantiasa menghayati, mempedomani, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Kesenjangan implementatif terdapat pada beberapa sisi, antara lain sisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum merata dinikmati oleh masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Padahal TIK dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila, jika semua anggota masyarakat telah mendapatkan fasilitas TIK tersebut secara memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas ini antara lain:

1. Platform Digital: Memanfaatkan platform digital, seperti media sosial, website, dan aplikasi mobile, untuk menyebarkan informasi tentang Pancasila dan mengajak masyarakat untuk memahami dan mengamalkannya.
2. Konten Kreatif: Mengembangkan konten-konten kreatif berbasis nilai-nilai Pancasila yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda yang mulai terbiasa bermain konten-konten pilihannya dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Forum Diskusi Online: Memfasilitasi forum diskusi online untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila, hal ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang banyak dan meluas ke seluruh wilayah di Daerah Khusus Jakarta.

Kesenjangan implementasi berikutnya yang masih dirasakan saat penelitian ini dilakukan, sebagai pekerjaan rumah yang belum selesai adalah terlukanya perasaan masyarakat terhadap beberapa persoalan yang tidak senada dengan nilai-nilai Pancasila, dan menjadi kontra produktif bagi tugas membumikan Pancasila tersebut, yaitu antara lain:

- a. Penegakan Hukum yang Adil: Memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu terhadap setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini yang membuat miris ketika masyarakat menyaksikan banyak persoalan hukum di Republik ini belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sermestinya.
- b. Keteladanan Pemimpin: Para pemimpin, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, harus memberikan contoh yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat saat ini merindukan keteladanan pemimpin yang dapat ditiru dan digugu dalam pengamalan Pancasila.

Terkait kondisi tugas penguatan ideologi Pancasila yang belum selesai ini, yang masih diliputi oleh kesenjangan implementasi ini, tim peneliti mengutip hasil wawancara

dengan Bapak Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Jakarta, beliau menyatakan bahwa: *“Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini menggarisbawahi pentingnya pemerataan dan distribusi kekayaan serta kesempatan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, agar pengembangan budaya dan kearifan lokal dapat berkembang dalam konteks sosial budaya. Bagi pengelola kebijakan publik mengawal sosial budaya berdasarkan Pancasila ini sebagai dasar dan filosofi yang masih berupaya diwujudkan dengan baik sampai saat ini pasca pemilihan umum 2024 ini. (Iqbal Akbarudin, Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Khusus Jakarta, 09 Januari 2025).*

Penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Itulah tugas yang belum selesai yang harus diselesaikan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kebijakan publik menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Penerapan Nilai-nilai Pancasila yang Komprehensif: Dimensi dan Cakupan.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan, mencakup berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Undang-undang Ibukota Negara, dan semakin gencar diterapkan setelah terbitnya Undang-undang Ibukota Negara tersebut, dengan segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah Khusus Jakarta.

Dimensi dan cakupan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kebijakan publik mengacu pada integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kebijakan publik, berupa dimensi dan cakupannya, yang dikutip dari buku Salam (2022) “Kebijakan Publik dan Pancasila” yang per pointnya diulas oleh tim peneliti, sebagai berikut:

1. Kebijakan Agama dan Kebebasan Beragama: Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kebijakan agama diwujudkan dengan menghormati kebebasan beragama dan keyakinan masing-masing individu tanpa diskriminasi. Pemerintah berperan dalam menjaga kebebasan beragama dan mendorong toleransi antar umat beragama, dan hal ini telah berlangsung sejak lama dan terus berlanjut ketika Undang-undang Pemindahan Ibukota sudah diterbitkan.
2. Kebijakan Kesejahteraan Sosial: Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menyediakan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan kesejahteraan sosial di wilayah Daerah khusus Jakarta memang terus bergulir sejak sebelum dan sesudah terbitnya Undang-undang pemindahan ibukota. Hal ini terbukti dari berbagai berita tentang berbagai kelebihan program kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan perlindungan sosial bagi warga masyarakat yang berKTP Jakarta.
3. Kebijakan Lingkungan Hidup: Penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam kebijakan lingkungan hidup yang berfokus pada perlindungan lingkungan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Hal ini meliputi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian

polusi, dan pelestarian ekosistem. Upaya ini terus dilakukan dengan serius, meskipun persoalan pengendalian polusi udara Jakarta masih belum berhasil dilakukan mencapai ambang batas baku mutu yang ditetapkan.

4. Kebijakan Pendidikan: Penerapan nilai Persatuan Indonesia tercermin dalam kebijakan pendidikan yang menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya, suku, dan agama dalam kurikulum pendidikan serta memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Kebijakan pendidikan di Jakarta, bahkan telah mendapat pujian dari berbagai pihak, dengan program pendidikan gratis sejak usia dini (PAUD), sampai Sekolah Menengah Atas bagi warga yang berKTP Jakarta yang bersekolah negeri.
5. Kebijakan Ekonomi dan Ketenagakerjaan: Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan ini, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta senantiasa memperhatikan keadilan distribusi ekonomi, dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, namun karena tingginya arus urbanisasi yang mencari lapangan pekerjaan di Jakarta dan sekitarnya, persaingan warga Jakarta mendapatkan pekerjaan yang layak semakin berat, hal ini pun harus terus diusahakan dalam upaya penguatan ideologi Pancasila di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Penguatan ideologi Pancasila berlangsung dalam kolaborasi yang terus berjalan, melibatkan kerja sama dari segenap pihak, terutama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam jajaran provinsi, lima wilayah kota, dan satu kabupaten, serta seluruh jajaran kecamatan, kelurahan, sampai pada RW dan RT. Di samping itu masih ada aktor lain yang bersinergi dengan jajaran utama pemerintahan tersebut, seperti kalangan pendidikan, perusahaan swasta, media massa, organisasi kemasyarakatan, kelompok agama dan lintas antar agama, organisasi dan kumpulan pemuda, serta basis paling dasar yang bersinergi tersebut adalah keluarga dari masyarakat luas secara keseluruhan. Diharapkan kolaborasi ini akan terus berjalan, agar sinergi multi aktor tersebut dapat semakin menguatkan ideologi Pancasila.

Berbagai bentuk kolaborasi yang terus berjalan tersebut, berlangsung satu demi satu, Tim Peneliti berhasil mewawancarai Bapak Munjirin, Walikota Jakarta Selatan (11 Maret 2025), beliau menyatakan: *“Iya, bentuk kolaborasi yang indah terus berjalan, seperti antara lain kegiatan penyuluhan dalam tema wawasan kebangsaan, yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Daerah Khusus Jakarta, sifatnya sistem ketok tular, pada tahap pertama mengundang aparatur Kelurahan yang ada di wilayah Daerah Khusus Jakarta, kemudian setiap Kelurahan mengundang pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) untuk menerima penyuluhan wawasan kebangsaan tersebut; bentuk dialogis yang akrab ternyata telah menanamkan bagaimana penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dapat disebarluaskan secara berdaya guna dan berhasil guna”*. (Munjirin, Walikota Jakarta Selatan, Kantor Balai Kota Jakarta Selatan, 11 Maret 2025).

Begitu pula kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Daerah Khusus Jakarta, bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Khusus Jakarta, menghadirkan para tokoh agama secara lintas agama, mendiskusikan indahnya kerukunan umat beragama dalam suatu acara yang dikemas dengan baik, meskipun berbeda keyakinan dalam beragama, tetapi mereka merasa disatukan dalam kehidupan yang Pancasila, yang rukun, damai,

bergotong royong dan saling bahu membahu, tolong menolong dalam berbagai persoalan kemasyarakatan yang mereka hadapi.

Demikian pula dalam kegiatan olah raga, terdapat atlet olah raga yang Pancasilais, di bidang kesehatan, terlatih para tenaga medis yang Pancasilais, bidang lingkungan hidup, ada kelompok masyarakat pengelola sampah, bahkan ada bank sampah, ada kelompok pecinta taman dan tanaman, ada kelompok pecinta kebersihan sungai yang Pancasilais dan sebagainya.

### **Pembahasan Lintas Temuan: Implikasi Teoritis dan Kontekstual**

Pembahasan lintas temuan, sebagai implikasi teoritis dan kontekstual memandang Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sistem nilai dan norma yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila ini saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, menjadi panduan bagi semua warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, itulah warna kontekstualnya.

Sedangkan implikasi teoritis, dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang *state of the art* dalam penelitian tentang penguatan ideologi Pancasila di era globalisasi, sekaligus era pemindahan ibukota Jakarta ke Penajam Paseer Utara di Kalimantan Timur, memunculkan berbagai kajian teori tentang ideologi Pancasila tersebut dikuatkan atau dilemahkan. Karena hal yang bertolak belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan. Karena nuansa protektif untuk mengawal dan menjaga penguatan nilai-nilai implementasi Pancasila itu maka yang dibuktikan adalah sikap dan perilaku masyarakatnya menjadi lebih Pancasilais atau sebaliknya.

Untuk menegaskan pembahasan lintas temuan ini, maka mengkaji implikasi teoritis dan kontekstual adalah dengan menggarisbawahi tentang nilai-nilai fundamental Pancasila (Salam, dkk., 2024) yang mengandung makna sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermoral dan berakhlak mulia. Kebijakan publik harus mencerminkan nilai ketuhanan ini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan. Dapat dikatakan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan keberadaan Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu bebas memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan publik harus berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menggarisbawahi pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam segala aspek kehidupan.
3. Persatuan Indonesia: Nilai persatuan Indonesia menjadi perekat bangsa yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan publik harus memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari diskriminasi dan mementingkan kepentingan bersama. Nilai Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman budaya, suku, dan agama. Semua warga negara diharapkan menjaga persatuan dan tidak melakukan tindakan yang merusak keutuhan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan publik harus disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang berkeadilan. Karena itu Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan ini, senantiasa menekankan pentingnya sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah atau perwakilan yang mengedepankan kepentingan rakyat seutuhnya, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari pembangunan nasional. Kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mendistribusikan sumber daya secara merata dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Pada akhirnya pembahasan lintas temuan ini menjadi penting terhadap Penguatan Pancasila yang sedang dibahas dari hasil penelitian ini, untuk mengamanatkan bahwa formulasi kebijakan publik yang belum sesuai dengan ruh Pancasila, harus dilakukan penguatan dengan berbagai strategi yang ditemukan dalam penelitian ini, termasuk kebijakan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Penajam Paseer Utara Kalimantan Timur, seyogianya harus sesuai dengan ruh Pancasila tersebut, dan sedapat mungkin dapat menumbuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta pasca UU IKN telah dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, khususnya Pemerintah Provinsi DKI. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Penguatan ideologi ini telah mencakup berbagai aspek kehidupan dan berlangsung melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, direkomendasikan lima langkah prioritas: (1) peningkatan kualitas pendidikan Pancasila di semua jenjang, (2) penguatan peran keluarga sebagai agen nilai, (3) optimalisasi media massa dalam promosi nilai Pancasila, (4) pelibatan aktif organisasi masyarakat, dan (5) peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2021). Penguatan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 25(2), 223-236.
- Afifuddin, M. (2020). Peran Politik Pendidikan Pancasila dalam Membangun Karakter Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 221-232.
- Agus Sartono, (2021). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Akbar, A. (2019). Analisis Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Politik*, 20(1), 1-18.
- Ardianto, E. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pancasila kepada Generasi Muda. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 167-178.
- Arifianto, D. (2020). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 21(1), 1-20.
- Basri, H. (2017). Penegakan Hukum sebagai Instrumen Penguatan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum*, 24(1), 53-68.
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 187-198.
- Darmawan, A. (2019). Relevansi Pancasila dalam Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Administrasi Publik*, 16(2), 221-234.
- Falah, M. F. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia.
- Gunawan, B. (2020). Peran Negara dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 4(02), 115-127.
- Haerisma, A. S. (2019). Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 187-199.
- Hartono, S. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik di Indonesia: Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(3), 345-360.
- Hasyim, L. O. M., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Perang Semesta Melalui Optimalisasi Penerapan Nilai Pancasila Persatuan Indonesia dalam Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Strategi Perang Semesta*, 7(1), 27-37.
- Kadirin Yatim. (2022). *Pancasila: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Kurniawaty, J. B., & Widayatmo, S. (2021). Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 1(1).
- Lestari, E. Y., Janah, M., & Wardanai, P. K. (2019). Menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era globalisasi melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).

- Maddison, S. & Denniss, R. (2009). *An Introduction to Australian Public Policy*. Cambridge University Press New York.
- Mahendra, Y. I. (2023). *Pancasila dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia.
- Mahfud, MD, (2024). *Politik Hukum Pancasila*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,
- Marbun, B. N. (2020). *Pancasila: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masduki, D. (2016). *Filsafat Politik Pancasila*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Okeke, M. I. (2001). *Theory and practice of public policy analysis: The Nigerian Experience*. Enugu: Bismark Publications
- Rahardjo, M. (2016). *Pancasila dan Tantangan Globalisasi*. *Jurnal Wawasan Nusantara*, 21(2), 315-330.
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 88-94.
- Salam, R. (2022). *Kebijakan Publik dan Pancasila*. Jakarta: Mahara Publishing.
- Salam, R. (2021). *Kembalilah Ke Pancasila*. Jakarta: Mahara Publishing.
- Salam, R., Zulkifli, Kodir, D. A., & Rahman, M. E. (2024). *Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Mahara Publishing.
- Salam, R., Zulkifli, Kodir, D. A., & Rahman, M. E. (2024). Kerakyatan atas Pengelolaan Peternakan Melalui Kerjasama Komunal yang Berbasis Pancasila. *Jurnal Sosial Sains*, 1(10), 1305-1314.
- Salam, R., Zulkifli, Kodir, D. A., Rahman, M. E., & Kusumawardhani, R. (2023). Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa dalam Era Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 23(1), 1-12.
- Salam, R., Zulkifli, Kodir, D. A., Rahman, M. E., & Rizki, N. (2023). Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 1-7.
- Sabika, S., El-saif, S. K., Ardi, C. M., & Santoso, G. (2022). Melangkah Bersama Menuju Masyarakat yang Adil dan Beradab: Menegakkan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(2), 77-88.
- Sardjito, M. (2018). *Filsafat Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syuhada, O. (2020). Fenomena Budaya Politik Parokial dan Perwujudandemokrasi Pancasila Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Journal Presumption of Law*, 2(1), 1-18.
- Utami, D., Susanti, R., & Meilinda. (2023). Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Identitas Manusia Indonesia di Sekolah. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(01), 14-24.
- Wibowo, K. A., & Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 4(1), 22-31.